

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar 2025, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :

1. Berdasarkan SE Walikota Blitar Nomor 900/0509/410.202.4/2025 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden RI mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka dianggap perlu melakukan efisiensi belanja;
2. Adanya kewajiban untuk menyelaraskan dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sehingga memerlukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan untuk efektivitas pencapaian kinerja yang diinginkan;
3. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65)

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 |
| BAB III | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya |
| BAB IV | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah |

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggun Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
I	Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85,5	32.573.251.650	87,34	14.754.061.994	85	8.635.269.067	90,88	1.640.519.351	0	0,00	90,88	1.640.519.351	106,92	19,00	90,88	16.394.581.345	106,29	50,33	Sekretariat
1	Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	440.568.931	99,99	115.486.300	100	136.329.316	68,25	0	0	0,00	68,25	0	68,25	0,00	68,25	115.486.300	68,25	26,21	
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	43.059.485	18,00	15.712.000	9	11.014.316	2	0	0	0,00	2,00	0	22,22	0,00	20,00	15.712.000	55,56	36,49	
b		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	397.509.446	14,00	99.774.300	7	125.315.000	8	0	0	0,00	8,00	0	114,29	0,00	22,00	99.774.300	78,57	25,10	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																68,25	0,00			67,06	30,79	
Predikat kinerja																Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100	25.622.742.948	101,54	11.328.440.111	100	6.403.340.493	35,29	1.465.396.112	0	0,00	35,29	1.465.396.112	35,29	22,88	35,29	12.793.836.223	35,29	49,93	
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	25.530.555.374	34	11.302.997.111	37	6.379.759.553	36	1.465.396.112	0	0,00	36	1.465.396.112	97,30	22,97	36	12.768.393.223	97,30	50,01	
b		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1000	41.525.253	596	10.705.000	250	10.621.871	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	596	10.705.000	59,60	25,78	
c		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72	50.662.321	36	14.738.000	18	12.959.069	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	36	14.738.000	50,00	29,09	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																32,43	7,66			68,97	34,96	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14		
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	1.703.556.769	82,89	1.019.291.880	100	960.410.175	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1.019.291.880	0,00	59,83			
a		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	227.897.859	4	113.407.300	2	582.946.888	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	4	113.407.300	50,00	49,76			
b		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47	484.071.552	46	259.847.500	47	123.822.137	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	46	259.847.500	97,87	53,68			
c		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37	991.587.358	34	646.037.080	37	253.641.150	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	34	646.037.080	91,89	65,15			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																0,00	0,00			79,92	56,20			
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah			
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	1.289.962.071	110,72	797.440.943	100	329.963.291	31,9	54.926.590	0	0,00	31,9	54.926.590	31,90	16,65	31,9	852.367.533	31,90	66,08			
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	17.949.856	2	8.650.000	1	4.591.448	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	2	8.650.000	50,00	48,19			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	129.346.94 2	7	53.070.250	3	33.086.04 8	0	0	0	0,0 0	0	0	0,00	0,00	7	53.070.250	58,33	41,03	
c		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	70.335.180	8	39.181.294	3	17.991.25 0	1	2.300.000	0	0,0 0	1	2.300.000	33,33	12,78	9	41.481.294	75,00	58,98	
d		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	108.791.86 5	32	41.688.800	12	27.828.20 3	3	1.970.000	0	0,0 0	3	1.970.000	25,00	7,08	35	43.658.800	72,92	40,13	
e		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	72.062.144	4	32.356.770	1	18.432.95 9	1	4.170.000	0	0,0 0	1	4.170.000	100,0 0	22,62	5	36.526.770	125,0 0	50,69	
f		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96	23.274.675	36	7.800.000	24	5.953.500	3	0	0	0,0 0	3	0	12,50	0,00	39	7.800.000	40,63	33,51	
g		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	868.201.40 9	64	614.693.82 9	20	222.079.8 83	8	46.486.59 0	0	0,0 0	8	46.486.59 0	40,00	20,93	72	661.180.41 9	109,0 9	76,16	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																30,1 2	9,06			75,8 5	49,8 1	
Predikat kinerja																Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Ting gi	Sang at Rend ah	
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	10 0	983.127.2 54	100, 00	176.210.0 00	10 0	251.477.1 15	50	17.405.00 0	0	0, 00	50	17.405.00 0	50,0 0	6,92	50	193.615.0 00	50,0 0	19,6 9	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggun Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14		
a		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	20	332.330.395	2	14.500.000	5	85.007.804	5	17.405.000	0	0,00	5	17.405.000	100,00	20,47	7	31.905.000	35,00	9,60			
b		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84	650.796.859	28	161.710.000	21	166.469.311	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	28	161.710.000	33,33	24,85			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																50,00	10,24			34,17	17,22			
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	1.195.517.433	100	720.759.735	100	189.401.000	27,88	85.958.470	0	0,00	27,88	85.958.470	27,88	45,38	27,88	806.718.205	27,88	67,48			
a		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	376.305.150	50	134.902.026	36	94.700.500	9	11.841.754	0	0,00	9	11.841.754	25,00	12,50	59	146.743.780	40,97	39,00			

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14		
b		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	819.212.28 3	26	585.857.70 9	13	94.700.50 0	4	74.116.71 6	0	0,0 0	4	74.116.71 6	30,77	78,26	30	659.974.42 5	57,69	80,56			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																27,8 8	45,3 8			49,3 3	59,7 8			
Predikat kinerja																Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Rend ah	Rend ah			
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	10 0	1.337.776. 244	130, 27	596.433.0 25	10 0	364.347.6 77	20, 11	16.833.17 9	0	0, 00	20, 11	16.833.17 9	20,1 1	4,62	20, 11	613.266.2 04	20,1 1	45,8 4			
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	245.410.35 4	18	203.839.72 5	17	62.837.70 9	18	9.328.179	0	0,0 0	18	9.328.179	105,8 8	14,84	18	213.167.90 4	105,8 8	86,86			
b		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	22.279.036	3	3.530.000	5	5.698.825	0	0	0	0,0 0	0	0	0,00	0,00	3	3.530.000	15,00	15,84			
c		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	90.512.625	58	82.769.500	20	23.152.50 0	12	7.505.000	0	0,0 0	12	7.505.000	60,00	32,42	70	90.274.500	87,50	99,74			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
d		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8	86.202.500	1	49.950.000	2	22.050.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	1	49.950.000	12,50	57,94	
e		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	475.320.585	4	186.992.600	2	121.583.700	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	4	186.992.600	50,00	39,34	
f		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	418.051.144	4	69.351.200	1	129.024.943	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	4	69.351.200	100,00	16,59	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																27,65	7,88			61,81	52,72	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																33,35	13,78			33,35	47,87	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%	12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
II	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85		83,42		82,5		81,42		0		81,42		98,69	81,42		95,79		Urban I
	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85	12.733.117.999	83,42	4.094.686.856	82,5	3.255.558.600	81,42	623.769.646	0	0,00	81,42	623.769.646	98,69	81,42	4.718.456.502	95,79	37,06	Urban II
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	92,5		92,07		90		93,51		0		93,51		103,90	93,51		101,09		Urban I
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92,5		92,07		90		93,51		0		93,51		103,90	93,51		101,09		Urban II

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14		
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100		100		100		0		0		0		0,00		100		100,00	Irbansus			
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90	12.464.973.443	92,07	4.030.307.956	90	3.186.969.087	93,51	623.769.646	0	0,00	93,51	623.769.646	103,90	0,00	93,51	4.654.077.602	103,90	0,00			
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,5		83,42		87,5		81,42		0		81,42		93,05		81,42		93,05				
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70		100		70		0		0		0		0,00		0		0,00				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10		10		10		0		0		0		0,00		10		100,00		
a		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120	669.731.167	83	195.518.700	30	171.350.030	6	495.569.646	0	0,00	6	495.569.646	20,00	289,21	89	691.088.346	74,17	103,19	
b		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160	365.138.545	84	138.821.990	40	93.399.900	15	0	0	0,00	15	0	37,50	0,00	99	138.821.990	61,88	38,02	
c		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120	2.898.629.731	171	435.224.660	30	739.659.422	6	76.000.000	0	0,00	6	76.000.000	20,00	10,27	177	511.224.660	147,50	17,64	
d		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200	583.130.576	158	221.415.100	50	149.428.764	8	20.161.000	0	0,00	8	20.161.000	16,00	13,49	166	241.576.100	83,00	41,43	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
e		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	7.165.860.057	7	2.955.775.406	3	1.832.977.167	0	32.039.000	0	0,00	0	32.039.000	0,00	1,75	7	2.987.814.406	58,33	41,70	
f		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	782.483.367	8	83.552.100	4	200.153.804	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	8	83.552.100	50,00	10,68	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																15,58	52,45			79,15	42,11	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100	268.144.556	113	64.378.900	100	68.589.513	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	64.378.900	0,00	24,01	
a		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8	130.405.702	4	31.185.400	2	33.356.872	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	4,0	31.185.400	50,00	23,91	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
b		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38	137.738.854	13,0	33.193.500	12	35.232.641	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	13,0	33.193.500	34,21	24,10	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																0,00	0,00			42,11	24,01	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																39,39	0,00			59,39	12,00	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																						
II I	Tujuan 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	4.001.075.901	100	1.308.649.646	100	1.029.924.699	100	268.046.050	0	0,00	100	268.046.050	100,00	26,03	100	1.576.695.696	100,00	39,41	Irbansus
	Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29		30		29		0		0		0		0,00		30		103,45		Irbansus

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14		
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1		4		1		0		0		0		0,00		4		400,00		Irbansus		
1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	16	315.299.604	9	79.519.550	4	80.651.446	1	0	0	0,00	1	0	25,00	0,00	10	79.519.550	62,50	25,22			
a		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16	65.785.507	7	22.828.150	4	16.827.475	1	0	0	0,00	1	0	25,00	0,00	8	22.828.150	50,00	34,70			
b		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16	249.514.097	8	56.691.400	4	63.823.971	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	8	56.691.400	50,00	22,72			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																12,50	0,00			50,00	28,71			
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/ pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100	3.685.776.297	100	1.229.130.096	100	949.273.253	0	268.046.050	0	0,00	0	268.046.050	0,00	0,00	0	1.497.176.146	0,00	40,62			
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100		100		100		0		0		0		0,00		0		0,00				
			Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16		8		4		0		0		0		0,00		8		50,00				
a		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	331.987.279	30	77.402.200	30	91.397.347	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	30	77.402.200	100,00	23,31			
b		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	452.994.138	14	306.847.846	10	115.872.750	0	217.960.550	0	0,00	0	217.960.550	0,00	188,10	14	524.808.396	140,00	115,85			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		14
c		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64	379.419.731	33	485.996.050	16	97.052.928	0	31.895.500	0	0,00	0	31.895.500	0,00	32,86	33	517.891.550	51,56	136,50	
d		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	2.521.375.149	10	358.884.000	6	644.950.228	4	18.190.000	0	0,00	4	18.190.000	66,67	2,82	14	377.074.000	58,33	14,96	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan (%)																16,67	55,95			87,47	72,65	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Rendah			Tinggi	Sedang	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																6,25	0,00			28,13	32,92	
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																						
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																68,01	15,01			133,72	42,26	
Predikat kinerja																Sedang	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota.
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator :
 - a. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1,
 - b. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2.
2. Realisasi kinerja program yang sesuai target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I :
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.
3. Realisasi kinerja program yang di bawah target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I :
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator :
 - a. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1.
 - b. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2.
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi).
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator :
 - a. Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A).
 - b. Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI).
4. Realisasi kinerja kegiatan yang melebihi target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti. Sedangkan 10 kegiatan yang lain masih di bawah target tahun 2025.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja antara lain:

1. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal;
2. Terdapat Mandatory yang diluar PKPT sehingga mengurangi waktu pendampingan;
3. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut;
4. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

Dari hasil evaluasi terhadap hasil kinerja Perangkat daerah Tahun 2025, berimplikasi terhadap perubahan target kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah
1	Sasaran : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	84 %	85,06 %
2	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99 %	86,69 %
3	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99 %	86,69 %
4	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	41 Orang/bulan
5	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	40 Orang
6	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	40 Orang
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	16 Laporan
8	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	59 Unit
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3 Unit

11	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 laporan	7 laporan
----	--	--	------------	-----------

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
- c. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
- d. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- e. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK.
- f. Mengoptimalkan klinik konsultasi pengawasan.
- g. Melakukan pergeseran anggaran sub kegiatan yang realisasi kinerjanya sudah tercapai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	
					SEBELUM	SESUDAH
1	TUJUAN 1: Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	LHP BPK RI Perwakilan Prov.Jatim atas LKPD	WTP	WTP
	SASARAN 1: Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	$\frac{\sum \text{Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi internal dan eksternal}} \times 100$	84%	85,06%
		Nilai Maturitas SPIP	Pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan system yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasarn organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan	Laporan Hasil Quality Assurance (QE) yang dikeluarkan oleh BPKP	LEVEL 3 (3,333)	LEVEL 3 (3,333)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	
					SEBELUM	SESUDAH
			keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP mengembangkan model Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3.			
2	TUJUAN 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	BB (72,30)	BB (74,80)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	
					SEBELUM	SESUDAH
	SASARAN 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP}} \times 100$	100%	100%
3	TUJUAN 3: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	A(84,99)	A(86,69)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	
					SEBELUM	SESUDAH
			2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.			
	SASARAN 3: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	A(84,99)	A(86,69)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	
					SEBELUM	SESUDAH
			kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.			

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progres dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2	Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas	▪ Melakukan pendampingan pembentukan agen perubahan di masing-masing OPD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan,

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
			Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3	Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP ▪ Melakukan koordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
4	Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.	▪ Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
5	Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas	▪ Merancang pembuatan inovasi layanan pengawasan Inspektorat melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Consulting Clinic (sipecutklik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
6	Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK	▪ Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SI PATRIAWAS ▪ Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan ▪ Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline ▪ Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
7	Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.	▪ Mengembangkan layanan klinik konsultasi pengawasan secara offline dan online	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Mengalami Perubahan

Program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2025 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85 Indeks	85 Indeks	8.583.814.564,00	7.696.452.766,00	
601.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	100%	35.373.100,00	35.373.100,00	
601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	7.040.600,00	7.040.600,00	
601.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	28.332.500,00	28.332.500,00	
601.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	6.164.013.564,00	6.169.501.769,00	
601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan	6.159.809.764,00	6.165.297.969,00	Penambahan jumlah pegawai

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	250 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	
601.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.553.800,00	2.553.800,00	
601.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	520.562.100,00	457.811.300,00	
601.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	60.045.000,00	15.045.000,00	Efisiensi
601.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	40 Orang	160.997.500,00	149.211.700,00	Penyesuaian jumlah pegawai
601.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	40 Orang	299.519.600,00	293.554.600,00	Penyesuaian jumlah pegawai
601.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100%	100%	299.876.700,00	262.322.800,00	
601.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.763.200,00	4.763.200,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	26.591.400,00	26.591.400,00	
601.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	23.413.900,00	25.775.700,00	
601.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.440.000,00	24.864.000,00	
601.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.874.000,00	14.874.000,00	
601.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	
601.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	16 Laporan	207.094.200,00	162.754.500,00	Efisiensi
601.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	27.409.300,00	52.615.600,00	
601.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	17.409.300,00	17.409.300,00	Penyesuaian rincian
601.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	52.615.600,00	Penambahan Pengadaan laptop dan printer
601.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar	100%	100%	439.336.200,00	405.390.522,00	
601.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	103.689.600,00	83.688.522,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	335.646.600,00	321.702.000,00	Efisiensi
601.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	1.097.243.600,00	313.437.875,00	
601.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	84.749.300,00	84.749.300,00	
601.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit	3.681.000,00	3.681.000,00	Penyesuaian target kinerja dengan rincian belanja
601.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	59 Unit	35.100.000,00	42.415.000,00	Penyesuaian target kinerja dengan rincian belanja
601.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Penyesuaian target kinerja dengan rincian belanja
601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	863.713.300,00	72.592.375,00	Efisiensi
601.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	90% 82,5% 100%	100% 82,5% 90%	3.002.171.900,00	2.560.183.980,00	
601.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	10 PD 70% 87,5% 90%	10 PD 70% 87,5% 90%	2.874.917.900,00	2.481.479.980, 00	
601.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	30 Laporan	703.693.700,00	586.568.080,00	Efisiensi
601.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	55.426.800,00	55.426.800,00	
601.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	30 Laporan	209.442.600,00	137.426.900,00	Efisiensi
601.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	50 Laporan	88.484.500,00	88.484.500,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	1.807.745.300,00	1.603.451.700,00	Efisiensi
601.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	10.125.000,00	10.125.000,00	
601.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	100%	127.254.000,00	78.704.000,00	
601.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	7.420.000,00	7.420.000,00	
601.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	119.834.000,00	71.284.000,00	Efisiensi
601.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100% 1 PD 30 PD	100% 1 PD 30 PD	609.650.700,00	669.108.000,00	
601.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan	4 Dokumen	4 Dokumen	34.322.700,00	34.322.700,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2025		Pagu Indikatif		
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
601.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	8.710.000,00	8.710.000,00	
601.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	25.612.700,00	25.612.700,00	
601.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100% 4 PD	100% 4 PD	575.328.000,00	634.785.300,00	
601.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	8.098.200,00	8.098.200,00	
601.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	258.743.600,00	256.693.600,00	Efisiensi
601.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	86.915.200,00	115.922.500,00	
601.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	221.571.000,00	254.071.000,00	
JUMLAH					12.195.637.164,00	10.925.744.746,00	

3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan			Nasional					Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Inspektorat				10.212.737.164	12.195.637.164	10.925.744.746						10.447.480.263		
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.212.737.164	12.195.637.164	10.925.744.746						10.447.480.263		
6	01					INSPEKTORAT DAERAH				10.212.737.164	12.195.637.164	10.925.744.746						10.447.480.263		
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85 Indeks	85 Indeks	7.590.926.264	8.583.814.564	7.696.452.766						85,5 indeks	7.704.993.978	
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	44.124.600	35.373.100	35.373.100			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100%	56.084.805	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	6.127.900	7.040.600	7.040.600	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi		9 dokumen	6.675.585	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	37.996.700	28.332.500	28.332.500	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		7 lapora n	49.409.220	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	6.165.496.964	6.164.013.564	6.169.501.769			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100 %	6.269.851.041	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bu lan	41 Orang/b ulan	6.159.809.364	6.159.809.764	6.165.297.969	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		37 orang /bula n	6.263.729.541	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 2	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n	250 Dokumen	250 Dokume n	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		250 doku men	1.669.500	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4.037.600	2.553.800	2.553.800	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		18 lapora n	4.452.000	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	444.535.900	520.562.100	457.811.300			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100 %	443.160.300	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian	2 Paket	1 Paket	54.040.500	60.045.000	15.045.000	Kota Blitar, Sanan	Dana Bagi	-	Peningka tan Pelayana		2 paket	52.226.790	INSPEKT ORAT

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas beserta Atribut Kelengkapa n						wetan, Sanan wetan	Hasil (DBH)		n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi					
6	0 1	0 1	2.0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	47 Orang	40 Orang	165.970.800	160.997.500	149.211.700	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		47 orang	155.274.660	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 1	2.0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	37 Orang	40 Orang	224.524.600	299.519.600	293.554.600	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		37 orang	235.658.850	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase Ketersediaa n Administras i Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %	100 %	297.176.900	299.876.700	262.322.800			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100 %	312.731.475	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.763.200	4.763.200	4.763.200	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		1 paket	4.713.450	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	26.591.400	26.591.400	26.591.400	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		3 paket	29.063.055	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.249.600	23.413.900	25.775.700	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		3 paket	21.132.825	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.840.000	20.440.000	24.864.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital		12 paket	20.834.940	INSPEKT ORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															dan Investasi				
6	0 1	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.938.500	14.874.000	14.874.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		1 paket	16.732.800	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokume n	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		24 doku men	2.835.000	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	16 Laporan	207.094.200	207.094.200	162.754.500	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		20 lapora n	217.419.405	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	100 %	100 %	20.845.400	27.409.300	52.615.600			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint	Inspektorat Daerah	100 %	14.726.795	INSPEKT ORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pemerintah Daerah	sesuai kebutuhan									ahan Berkasis Digital dan Investasi				
6	0 1	0 1	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	10.845.400	17.409.300	17.409.300	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berkasis Digital dan Investasi		5 unit	1.050.000	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	35.206.300	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berkasis Digital dan Investasi		21 unit	13.676.795	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar	100 %	100 %	439.336.200	439.336.200	405.390.522			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berkasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100 %	433.413.697	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan	36 Laporan	36 Laporan	103.689.600	103.689.600	83.688.522	Kota Blitar, Sanan	Dana Bagi	-	Peningka tan Pelayana		36 lapora n	108.874.080	INSPEKT ORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						wetan, Sanan wetan	Hasil (DBH)		n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi				
6	0 1	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	335.646.600	335.646.600	321.702.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		13 lapora n	324.539.617	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	179.410.300	1.097.243.600	313.437.875			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah	100 %	175.025.865	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	18 Unit	18 Unit	91.849.300	84.749.300	84.749.300	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		17 unit	85.605.240	INSPEKT ORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)					
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan			Nasional					Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
6	0	1	0	1	2.0	00	05 Pemeliharaan Mebel															
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit	3.681.000	3.681.000	3.681.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		5 unit	3.865.050	INSPEKT ORAT			
6	0	1	0	1	2.0	00	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	59 Unit	35.160.000	35.100.000	42.415.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		20 unit	34.620.075	INSPEKT ORAT			
6	0	1	0	1	2.0	00	08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3 Unit	25.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		2 unit	26.250.000	INSPEKT ORAT			
6	0	1	0	1	2.0	00	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	13.720.000	863.713.300	72.592.375	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan		2 unit	14.185.500	INSPEKT ORAT			

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dipelihara/ Direhabilita si									Berbasis Digital dan Investasi				
6	0 1	0 1	2.0 9	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		1 unit	10.500.000	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 2 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 2 Persentase TLHP Internal yang selesai	100 % 82,5 % 90 % 82,5% 90%	100 % 82,5 % 90 % 82,5% 90%	2.012.160.200	3.002.171.900	2.560.183.980						100 % 85% 92,5% 85% 92,5%	2.102.353.050		

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							ditindaklanj uti pada wilayah 1 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1													
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelengga raan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendas i hasil audit APIP yang ditindaklanj uti Persentase rekomendas i hasil audit BPK yang ditindaklanj uti	10 PD 70 % 87,5 % 90 %	10 PD 70 % 87,5 % 90 %	1.984.791.100	2.874.917.900	2.481.479.980			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 PD 70 % 87,5 % 90%	2.073.615.495	INSPEKT ORAT
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	30 Laporan	30 Laporan	88.693.700	703.693.700	586.568.080	Kota Blitar, Sanan wetan,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint		30 lapora n	93.128.385	INSPEKT ORAT

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Pemerintah Daerah							Sanan wetan			ahan Berdasarkan Digital dan Investasi				
6	0 1	0 2	2.0 1	00 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	55.426.800	55.426.800	55.426.800	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berdasarkan Digital dan Investasi		40 lapora n	58.198.140	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 2	2.0 1	00 03	Reviu Laporan Kinerja															
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	30 Laporan	209.442.600	209.442.600	137.423.900	Kota Blitar, Sanan wetan, Semua Kel/De sa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berdasarkan Digital dan Investasi		30 lapora n	219.914.730	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 2	2.0 1	00 04	Reviu Laporan Keuangan															
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	50 Laporan	88.484.500	88.484.500	88.484.500	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berdasarkan Digital dan Investasi		50 lapora n	92.908.725	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 2	2.0 1	00 06	Kerja Sama Pengawasan Internal															

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kesepakata n Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepaka tan	3 Kesepak atan	1.532.618.500	1.807.745.300	1.603.451.700	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		3 kesep akata n	1.598.834.265	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 2	2.0 1	00 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP	4 Dokumen	4 Dokume n	10.125.000	10.125.000	10.125.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		4 doku men	10.631.250	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 2	2.0 2			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaa n dengan tujuan tertentu (PDTT)	100 %	100 %	27.369.100	127.254.000	78.704.000			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	100 %	28.737.555	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 2	2.0 2	00 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															
							Jumlah Laporan Penyelesaia n Kerugian Negara/Dae	2 Laporan	2 Laporan	7.420.000	7.420.000	7.420.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan		2 lapora n	7.791.000	INSPEKT ORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						rah yang Ditangani									Berbasis Digital dan Investasi				
6	0 1	0 2	2.0 2	00 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	7 Laporan	19.949.100	119.834.000	71.284.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		12 lapora n	20.946.555	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100 % 1 PD 30 PD	100 % 1 PD 30 PD	609.650.700	609.650.700	669.108.000						100% 1 PD 29 PD	640.133.235	
6	0 1	0 3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan	4 Dokumen	4 Dokume n	34.322.700	34.322.700	34.322.700			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint	Inspektorat Daerah	4 doku men	36.038.835	INSPEKT ORAT

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Fasilitasi Pengawasan										ahan Berbasis Digital dan Investasi				
6	0 1	0 3	2.0 1	00 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
						Jumlah Rekomenda si Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomen dasi	4 Rekomen dasi	8.710.000	8.710.000	8.710.000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		4 rekom endasi	9.145.500	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 3	2.0 1	00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan															
						Jumlah Rekomenda si Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomen dasi	4 Rekomen dasi	25.612.700	25.612.700	25.612.700	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		4 rekom endasi	26.893.335	INSPEKT ORAT	
6	0 1	0 3	2.0 2			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/peng aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 % 4 PD	100 % 4 PD	575.328.000	575.328.000	634.785.300			-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	4 PD 100% 100 %	604.094.400	INSPEKT ORAT

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP													
6	0 1	0 3	2.0 2	00 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah	30 perangkat daerah	30 perangka t daerah	8.098.200	8.098.200	8.098.200	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		30 peran gkat daera h	8.503.110	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 3	2.0 2	00 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangka t daerah	258.743.600	258.743.600	256.693.600	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan Berbasis Digital dan Investasi		10 peran gkat daera h	271.680.780	INSPEKT ORAT
6	0 1	0 3	2.0 2	00 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	86.915.200	86.915.200	115.922.500	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningka tan Pelayana n Pemerint ahan		16 kegiat an	91.260.960	INSPEKT ORAT

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

4.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Inspektur Pembantu dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pengawasan yang semakin kompleks, Inspektorat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan pengawasan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses pengawasan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- e. Dengan ditetapkannya P-Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan P-Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.